



RENJA

(RENCANA KERJA)

Tahun 2022

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

Jln. Brawijaya No.231 Pungging, Telp. (0321)390211 Fax. (0321)390210

KATA PENGANTAR

Penyusunan Kerja (Renja) Tahun 2022, Merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun. Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci berpedoman dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintahan daerah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah.

Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto tahun 2022 tidak terlepas dari Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto 2022-2026. Dalam Renja Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 ini terdapat 6 (Enam) Program, 20 (Dua Puluh) Kegiatan dan 42 (Empat Puluh Dua) Sub-Kegiatan.

Harapan kami semoga Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto ini benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program, kegiatan dan sub-kegiatan, Lokasi Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, serta pagu indikatif Tahun 2022 dan prakiraan maju kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto tahun 2023 mendatang.

Mojokerto, Pebruari 2021
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO



NIP. 19790804 199810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD6	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	16
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD	18
2.4. Review Terhadap Awal RKPD	22
2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan.....	25
BAB III TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH	26
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	28
3.3. Program dan Kegiatan.....	28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	48
BAB V PENUTUP	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja OPD ini mengacu pada renstra OPD serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Renstra OPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada Rancangan awal OPD. Renstra OPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas awal OPD yang disusun ke dalam Renja OPD, selaras dengan Renstra OPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra OPD berdasarkan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan fungsi OPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam Renja OPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Renstra OPD.

Renja OPD dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh DPRKP2, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD

berdasarkan usulan program dan kegiatan, penyesuaian program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah ;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur 2005-2025;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodesifikasi, dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan dan keuangan daerah
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor
- n. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tatakerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- b. Memberikan acuan bagi OPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- c. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- d. Memberikan acuan bagi OPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- e. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.
- f. Memberikan acuan bagi OPD dalam menjangkau tujuan / indikator tujuan OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja SKOPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja OPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, Analisis Kinerja OPD dan Isu-isu penting Tugas

dan Fungsi OPD serta Review terhadap Ranwal Renja RKOPD dan Kajian usulan Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan.

BAB III. Tujuan, sasaran, Perangkat Daerah

Berisi ulasan terhadap Kebijakan Nasional tujuan dan sasaran OPD serta faktor-faktor yang menjadikan bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.

BAB IV. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 secara rinci sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pencapaian kinerja program pelayanan kesekretariatan adalah Tersedianya data sebagai bahan penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan dan lancarnya aktifitas pelayanan administrasi kantor dan pelaksanaan tugas.

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub-Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub- Kegiatan:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub- Kegiatan:

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- c. Penyediaan Bahan/Material
- d. FASILITASI KUNJUNGAN TAMU

- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
 - Sub- Kegiatan:**
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub- Kegiatan:**
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub- Kegiatan:**
 - a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

2) Program Pengembangan Perumahan

Pencapaian kinerja adalah Persentase kualitas sarana prasarana permukiman layak huni.

Kegiatan :

- 1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**

Sub- Kegiatan:

- a. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus

2. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Sub- Kegiatan:

- a. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

3. Penerbitan Izin Dan Pengembangan Perumahan

Sub- Kegiatan:

- a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

4. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)

Sub- Kegiatan:

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)

3) Program Kawasan Permukiman

Pencapaian kinerja adalah Persentase kualitas sarana prasarana permukiman layak huni.

Kegiatan :

1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Sub- Kegiatan:

- a. Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- b. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh

2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

- a. Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
- b. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
- c. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

4) Program Peningkatan Parasarana, Sarana Dan Utilitas Umum

Pencapaian Kinerja Adalah Persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan

Kegiatan :

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Sub-Kegiatan :

- a. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

5) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Pencapaian Kinerja Adalah Persentase pelanggaran lalu lintas dan kelancaran arus lalu lintas.

Kegiatan :

1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Sub-Kegiatan :

- a. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- b. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sub-Kegiatan :

- a. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
- d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Sub-Kegiatan :

- a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Sub-Kegiatan :

- a. Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik

5. Pengujian Kendaraan Bermotor

Sub-Kegiatan :

- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Sub-Kegiatan :

- a. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

7. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub-Kegiatan :

- a. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Tabel T-C. 29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021
Kabupaten Mojokerto

Kode	Urusan Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Target Program Dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	TingkatCapaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7=9)	11=(10/4)
	Program Layanan Kesekretariatan									
	Penyusunan Rencana Tahunan Dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	100	-	100	67,39	73,25	100	-	100
	Pengelolaan administrasi keuangan DPRKP2	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	12 bln	-	100	87,68	95,31	100	-	100
	ketatausahaan dan kepegawaian DRPKP2	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi perkantoran	12 bln	-	100	65,80	71,52	100	-	100

			Penunjang DAK Fisik Bidang Perumahan Dan Permukiman (APBN)	Persentase penunjang DAK fisik perumahan	100	-	100	89,00	99,01	100	-	100
			Penunjang DAK REGULER Bidang Perumahan Dan Permukiman (APBD)	Prosentase Lingkungan yang Memenuhi Standar Kesehatan	100	-	100	83,81	84,51	100	-	100
			BOP Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Jumlah BOP Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang terpenuhi	100	-	100	75,03	86,08	100	-	100
			Penunjang Kegiatan Tim Verifikasi PSU Perumahan	(Jumlah Lingkungan yang Memenuhi Standar Kesehatan/Total Lingkungan) x 100%	100	-	50	42,00	0,00	50	-	50
			Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	(Jumlah Lingkungan yang Memenuhi Standar Kesehatan (JALAN POROS/Jumlah lingkungan) x 100%	100	-	-	-	-	50	-	-
			BOP Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah	Jumlah BOP kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial ekonomi Wilayah yang terpenuhi	10 skor	-	-	-	-	50	-	-
			Pembangunan Sarana Pendukung Kawasan Permukiman	Jumlah sarana pendukung kawasan permukiman yang terbangun	1 Perbup	-	100,00	100,00	0,00	80	-	80

				BOP Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Jumlah BOP penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMISMAS) yang terpenuhi	1 Saprass	-	85,36	85,36	93,46	80	-	80
				BOP Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Jumlah BOP kegiatan pemerintah pusat kota tanpa kumuh yang terpenuhi	1 data	-	86,94	86,94	77,03	80	-	80
				Pengadaan Peralatan Survey Permukiman dan Pertanahan	jumlah peralatan survey yang tersedia	1 BOP	-	0,00	0,00	99,01	100	-	100
				BOP Penyusunan Perda Pemakaman	Jumlah peraturan bupati tentang penyelenggaraan pemakaman yang tersusun	1 BOP	-	39,03	39,03	99,01	100	-	100
				BOP Penerbitan Rekomendasi Izin Permukiman Dan Pertanahan	Jumlah BOP kegiatan rekomendasi perijinan permukiman dan pertanahan yang terpenuhi	1 BOP	-	0,00	0,00	37,13	80	-	80
				Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Persentase ;enyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS)	100	-	-	-	-	80	-	80
				Pemeliharaan Makam Mantan Bupati	Jumlah bangunan bersejarah makam mantan bupati mojosukerto yang terpelihara	1 Bangunan	-	94,39	94,39	75,59	80	-	80

			Peningkatan Disiplin Masyarakat Pengguna Jasa Transportasi Forum LLAJ	Jumlah rapat koordinasi Forum Lalu Lintas	1 kegiatan	-	77,80	77,80	83,37	100	-	100
			Penganugrahan Duta Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata Nugraha)	Persentase Meningkatnya Koordinasi antar Instansi Pembina Jalan dan Pengguna Jalan	1 Dokumen	-	100,00	100,00	97,98	100	-	100
			Duta Tertib Lalu Lintas	Jumlah Duta Tertib Lalu Lintas	3 Fasiitas	-	100,00	100,00	97,53	100	-	100
			Sosialisasi Dan Pembinaan Penggunaan Angkutan Jalan	Jumlah kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Penggunaan Angkutan Jalan	3 Kegiatan	-	37,50	37,50	83,37	100	-	100
			Pengamanan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Jumlah kegiatan Pengamanan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	20 Rakor	-	91,82	91,82	8,80	100	-	100
			Pengamanan Insidentil	Jumlah Kegiatan Operasi dan PAM	10 orang	-	76,35	76,35	0,00	100	-	100
			Pemeliharaan Sarana Dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana Dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor yang terpelihara	20 Kegiatan	-	84,21	84,21	99,01	70	-	70
			Pengadaan Flasher dan Warning Light	Jumlah Flasher / Warning Light yang diadakan	90	-	98,96	98,96	97,95	70	-	70
			Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas yang terpelihara	95	-	98,51	98,51	99,01	70	-	70
			Peningkatan Pengelolaan Perparkiran	Jumlah lahan parkir yang dikelola	90	-	84,20	84,20	84,51	70	-	70

				Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	Jumlah terminal yang dibangun/dipelihara	2 Terminal	-	8,88	8,88	86,08	70	-	70
				DAK Fisik Bidang Keselamatan Jalan (PENUGASAN)	Jumlah rambu APIL yang diadakan	90	-	0,00	0,00	0,00	70	-	70
				Penunjang DAK PENUGASAN Bidang Keselamatan Jalan	Meningkatnya pelayanan lalu lintas	70	-	100,00	100,00	38,64	70	-	70

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Memuat kajian terhadap kondisi pelayanan teknis OPD, organisasi dalam OPD, tugas dan fungsi pelayanan OPD, pedoman pelaksanaan pelayanan pada OPD, keterkaitan program Pemerintah Provinsi dengan OPD, serta analisa capaian pendapatan asli daerah yang berisi tentang target pendapatan asli daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2013 tentang retribusi parkir berlangganan.

Target Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto selama periode Perubahan Renstra 2022-2026 bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel.T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Kabupaten Mojokerto

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra (SPM)SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase lingkungan peningkatan kualitas lingkungan perumahan	-	-	50	50	70	80	57,97	-	70	80	-
2.	Persentase Kualitas Sarana Prasarana Permukiman Layak Huni	-	-	80	87	93	95	69,93	-	93	95	-
3.	Persentase fasilitas sarana prasarana jalan yang terpasang layak fungsi	-	-	65	70	82	87	81,10	-	82	87	-
4.	Persentase Pelanggaran Lalu Lintas dan Kelancaran Lalu Lintas	-	-	100	100	100	100	45,08	-	100	100	-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD

1. Tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis terkait dengan pelayanan OPD

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tolak ukur kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah sampai dengan Tahun 2026.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang target keberhasilan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja merupakan kondisi yang ditetapkan sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat capaian kondisi yang ditetapkan sebagai ukuran mengetahui tingkat capaian dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan yang direncanakan, tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya dapat dimonitor dan di evaluasi. Selanjutnya hasil dari evaluasi ini akan menjadi indikator keberhasilan dan sasaran tujuan dan OPD. Keberhasilan tujuan dan sasaran OPD yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Mojokerto akan berkontribusi pada capaian tujuan dan sasaran Kabupaten Mojokerto.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah dipengaruhi oleh faktor Lingkungan strategis. Adapun lingkungan strategis yang dimaksud adalah lingkungan internal yang terdiri dari kekuatan

(*strenghts*) (S) dan kelemahan (*weakness*) (W) dan lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang (*opportunity*) (O) dan tantangan (*threats*) (T).

Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal organisasi merupakan hal yang penting dalam menetapkan factor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*) bagi suatu organisasi. Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal organisasi akan tergambar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi organisasi. Analisis ini diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam merespon setiap perkembangan dan dinamika lingkungan.

Metode yang diterapkan dalam melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sebagai faktor-faktor kunci keberhasilan (*key succes factors*) yang merupakan faktor penentu yang dipandang sangat penting dalam pencapaian tujuan dan sasarandengan menerapkan metode analisis SWOT (*strenghts, weaknesses, opportunities dan threats*). Implementasi metode ini akan membantu OPD untuk memperkuat keunggulannya dengan menangkap peluang yang ada atau menekan kelemahannya melalui penyelesaian terhadap tantangan yang dihadapi. Hal yang paling buruk akan terjadi, apabila OPD mengembangkan kelemahnya karena ketidakmampuannya untuk mengantisipasi dan mengatasi ancaman yang terjadi. Identifikasi yang dirumuskan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

a. Permasalahan :

1. Perencanaan urusan perumahan dan permukiman masih lemah belum adanya dokumen kebijakan strategi tentang penataan ruang dan permukiman sebagai pengendali pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Regulasi tentang perumahan masih lemah belum didukung dengan peraturan perundang-undangan yang jelas
3. Belum optimalnya kinerja aparat sebagai akibat masih belum meratanya tingkat pengetahuan dan ketrampilan mengenai aspek teknis dan operasional

4. Keterbatasan wewenang dalam melakukan pengendalian dan penegakan hukum.
5. Kurangnya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan yang berkelanjutan untuk menunjang SDM yang berkualitas.
6. Keterbatasan sarana dan prasarana.
7. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan operasional.
8. Masih terbatasnya kemampuan manajerial dari sebagian besar staf mengenai aspek operasional kegiatan.
9. Masih lemahnya kepastian hukum terutama aspek kepegawaian (*reward and punishment*).
10. Masih kurang mantapnya kinerja lembaga akibat tumpang tindihnya tupoksi antar instansi.
11. Masih kurangnya tenaga dengan kualifikasi pendidikan yang memadai dan kompatibel.
12. Masih kurangnya sumber dana untuk operasional kegiatan pada masing-masing bidang.
13. Belum optimalnya pemanfaatan sarana yang dimiliki dalam rangka menunjang kegiatan dinas.
14. Masih kurang sinergisnya diantara masing-masing sub dinas dalam hal pelaksanaan kegiatan.
15. Letak kantor jauh dari pusat pemerintahan.

b. Hambatan

1. Terbatasnya anggaran operasional
2. Letak kantor terlalu jauh dengan pusat pemerintahan
3. Terbatasnya sarana prasarana operasional
4. Terbatasnya tenaga operasional teknis

3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional

Dalam mencapai sasaran dan prioritas nasional pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Perhubungan belum bisa di optimalkan dikarenakan semakin banyaknya jumlah penduduk dan rumah tangga baru yang membutuhkan tempat tinggal yang layak huni, adapun semakin berkurangnya transportasi umum membuat menurunnya jumlah penumpang sehingga secara factual mengurangi/menggangu fungsi terminal.

Pengembangan sector/ komoditas/kegiatan unggulan daerah berpengaruh kepada meningkatnya jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat milik pribadi yang murah untuk mendapatkannya, sehingga menjadi ancaman serius terhadap kesemrawutan lalulintas serta tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalulintas yang kurang sopan dan tidak mematuhi rambu-rambu lalulintas.

4. Formulasi isu-isu penting

- a. Pemerataan Rumah Layak Huni bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mojokerto
- b. Peningkatan fasilitas sanitasi dan fasilitas umum bagi kawasan kumuh
- c. Semakin banyaknya jumlah penduduk dan rumah tangga baru yang membutuhkan tempat tinggal yang layak huni.
- d. Semakin berkembangnya industri properti.
- e. Semakin berkurangnya transportasi umum membuat menurunnya jumlah penumpang sehingga secara faktual mengurangi/menggangu fungsi terminal.
- f. Jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat milik pribadi yang murah untuk mendapatkannya, sehingga menjadi ancaman serius terhadap kesemrawutan lalulintas.
- g. Tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalulintas kurang sopan dan tidak mematuhi rambu-rambu lalulintas.

- h. Kabupaten Mojokerto merupakan Wilayah Gerbang Kertasusila dan dekat dengan ibukota provinsi sehingga menjadi wilayah dengan tingkat lalu lintas kendaraan yang cukup tinggi sehingga menimbulkan potensi kerawanan lalu lintas.

2.4. Review Terhadap Awal RKPD

1. Perbandingan Antara Ranwal RKPD Dengan Hasil Analisis Kebutuhan

Membandingkan antara Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Perumusan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Berkaitan dengan hal tersebut maka ada beberapa usulan program dan kegiatan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto yang tidak sesuai dengan dari Ranwal RKPD. Dapat diperhatikan pada Tabel T-C 33 Rumus rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023.

2. penjelasan Alasan Proses dilakukan

Tupoksi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto. Maka sesuai dengan Instruksi Permendagri 86 tahun 2017 dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Perlu memperhatikan Tabel 4.2 Persandingan Prioritas Kabupaten Mojokerto dengan Nasional pada Ranwal RKPD Tahun 2022. Parihal tersebut bertujuan untuk mencapai target kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.

3. Penjelasan Temuan Dan Catatan Penting Terhadap Perbedaan Dengan Ranwal RKPD Review Terhadap Awal RKPD Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto akan di jelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
(Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Review Terhadap Awal RKPD Tahun Anggaran 2022
Kabupaten Mojokerto

No.	Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jabupaten/Kota	DPRKP2	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi perkantoran	100	13.550.702.477,-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jabupaten/Kota	DPRKP2	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi perkantoran	100	13.649.702.477,-	
2	Program Pengembangan Perumahan	DPRKP2	Persentase peningkatan kualitas perumahan	50	939.000.000,-	Program Pengembangan Perumahan	DPRKP2	Persentase peningkatan kualitas perumahan	50	939.000.000,-	
3	Program Kawasan Permukiman	DPRKP2	Persentase kualitas sarana prasarana permukiman layak huni	80	6.117.000.000,-	Program Kawasan Permukiman	DPRKP2	Persentase kualitas sarana prasarana permukiman layak huni	80	6.117.000.000,-	
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	DPRKP2	Persentase kualitas sarana prasarana permukiman layak huni	80	1.910.000.000,-	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	DPRKP2	Persentase kualitas sarana prasarana permukiman layak huni	80	1.910.000.000,-	
4	Program Lalu Lintas Angkutan Jalan	DPRKP2	Persentase pelanggaran lalu lintas dan kelancaran arus lalu lintas	100	5.410.000.000,-	Program Lalu Lintas Angkutan Jalan	DPRKP2	Persentase pelanggaran lalu lintas dan kelancaran arus lalu lintas	100	5.410.000.000,-	
TOTAL					28.025.702.477,-	TOTAL					28.025.702.477,-

2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait Langsung dengan Pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra OPD.

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Terkait dengan tugas Pokok Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dalam urusan Perumahan dan Permukiman dengan kebijakan Nasional sebagaimana dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 bahwa Pembangunan dan Pengembangan Kawasan perkotaan dilaksanakan melalui peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru dan penghidupan yang berkelanjutan. Upaya pencapaian target selaras Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2022-2026 yang mengamanatkan bebas kumuh dan 100 persen akses sanitasi yang layak pada akhir 2026. Indikator 100% yang dimaksud ialah, Indonesia bisa memenuhi 85% Standart Pelayanan Minum (SPM) dan 15% memenuhi kebutuhan dasar. Dalam memenuhi SPM di sektor air minum setidaknya setiap warga bisa mendapatkan akses sebanyak 60 liter/orang/detik. Adanya sistem penanganan sampah di perkotaan sebesar 70% Target universal access pada 2026 mendatang bukanlah merupakan hal mudah yang bisa dicapai, pasalnya dalam memenuhi target ini perlu lompatan besar yang dilakukan. Terlebih, hingga kini capaian akses air minum aman dan sanitasi layak Indonesia masih kurang optimal.

Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta kawasan andalan yang cepat berkembang. Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara

sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi .

TABEL 3.1

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

SASARAN		PRIORITAS			
		NASIONAL		KABUPATEN	
1.	Pembangunan Infrastruktur	1.	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1.	Pengembangan Infrastruktur dan Ekonomi Wilayah
		a.	Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah	a.	Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah
		b.	Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	b.	Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Bersinergi dengan AgroWisata dan UMKM dari hulu ke hilir
		c.	Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif	c.	Percepatan perwujudan Kawasan Ekonomi Khusus
		d.	Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah	d.	Peningkatan nilai tambah industri, perdagangan dan ekonomi kreatif melalui dengan memanfaatkan teknologi digital (industri 4.0), melalui peningkatan kemampuan pelaku

					usaha dalam pemasaran melalui e-commerce, dan peningkatan diversifikasi produk dan inovasi teknologi produksi
		e.	Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata	e.	Meningkatkan layanan infrastruktur dasar
		a.	Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah	a.	Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah

- a. meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

Sasaran Perangkat Daerah :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perhubungan
2. Meningkatnya infrastruktur kesehatan permukiman

3.3. Program dan Kegiatan

Pada Program dan kegiatan di Tahun 2022 ini kami sesuaikan dengan Kerangka Logis Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dengan dasar Misi 7 Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto.

Program di usulan tahun 2022 yakni 6 (Enam) Program, 20 (Dua Puluh) Kegiatan dan 42 (Empat Puluh Dua) Sub-Kegiatan.

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan.
 - Pemerataan Rumah Layak Huni bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mojokerto

- Peningkatan fasilitas sanitasi dan fasilitas umum bagi kawasan kumuh
- Semakin banyaknya jumlah penduduk dan rumah tangga baru yang membutuhkan tempat tinggal yang layak huni.
- Semakin berkembangnya industri properti.
- Semakin berkurangnya transportasi umum membuat menurunnya jumlah penumpang sehingga secara faktual mengurangi/menggangu fungsi terminal.
- Jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat milik pribadi yang murah untuk mendapatkannya, sehingga menjadi ancaman serius terhadap kesemrawutan lalulintas.
- Tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalulintas kurang sopan dan tidak mematuhi rambu-rambu lalulintas.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

a. Jumlah Program dan Kegiatan pada DPRKP2 terdiri dari 6 (Enam) Program, 20 (Dua Puluh) Kegiatan dan 42 (Empat Puluh Dua) Sub-Kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Peningkatan Parasarana, Sarana Dan Utilitas Umum
5. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

b. Jumlah kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

8. Penerbitan Izin Dan Pengembangan Perumahan
9. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
10. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
11. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
12. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
13. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
14. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
15. Pengujian Kendaraan Bermotor
16. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
17. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
18. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
19. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
20. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

b. Jumlah Sub-Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Bahan/Material
8. FASILITASI KUNJUNGAN TAMU
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
16. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
17. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
18. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
19. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik
20. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
21. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
22. Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
23. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
24. Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
25. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
26. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
27. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
28. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
29. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
30. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

31. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
32. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
33. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
34. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
35. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
36. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
37. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik
38. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
39. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
40. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
41. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
42. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

c. Total kebutuhan dana/ Pagu indikatif

Bagian ini menjelaskan tentang total kebutuhan dana dan pagu indikatif pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto yang dijelaskan pada tabel T-C 33 dibawah ini.

3. Rumusan program kegiatan yang tidak sesuai dengan ranwal RKPD

Bagian ini menjelaskan tentang rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun

kombinasi keduanya, pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto yang dijelaskan pada tabel T-C 33 dibawah ini.

4. Tabel renncana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tabel T-C 33

Bagian ini menjelaskan tentang rencana program dan kagiatan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto berdasarkan hasil pengerjaan tabel T-C 33 dibawah ini.

Tabel T-C 33
Rumus rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2022
Dan prakiraan maju tahun 2023
Kabupaten Mojokerto

Kode					Urusan Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pengelolaan administrasi perkantoran, dan Peningkatan kinerja kepegawaian	Kabupaten Mojokerto	100	Rp 13.649.702.477,-	APBD		100	Rp 13.649.702.477,-
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan PD	Kabupaten Mojokerto		Rp 10.000.000,-	APBD			Rp 10.000.000,-
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun	Kabupaten Mojokerto	7 Lap	Rp 5.000.000,-	APBD		100	Rp 5.000.000,-

2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Program dan Kegiatan PD	Kabupaten Mojokerto	7 lap	Rp 5.000.000,-	APBD		100	Rp 5.000.000,-
2	15	01	2.02		Admisitrasi keuangan perangkat daerah	Indeks kepuasan masyarakat/ aparaturn terhadap pelayanan kesekretariatan PD	Kabupaten Mojokerto		Rp 10.278.452.477,-	APBD		100	Rp 10.278.452.477,-
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Mojokerto	14 bln	Rp 10.078.452.477,-	APBD		14 bln	Rp 10.078.452.477,-
2	15	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan	Kabupaten Mojokerto	12 bln	Rp 200.000.000,-	APBD		12 bln	Rp 200.000.000,-
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 749.000.000,-				Rp. 749.000.000,-
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Kabupaten Mojokerto	12 bln	Rp. 99.000.000,-	APBD		12 bln	Rp. 99.000.000,-
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi	Kabupaten Mojokerto	12 bln	Rp. 540.000.000,-	APBD		12 bln	Rp. 540.000.000,-

2	15	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	Kabupaten Mojokerto	12 bln	Rp. 30.000.000,-	APBD		12 bln	Rp. 30.000.000,-
2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Mojokerto	12 bln	Rp. 25.000.000,-	APBD		12 bln	Rp. 25.000.000,-
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas luar daerah 12 Bulan		12 bln	Rp. 55.000.000,-	APBD		12 bln	Rp. 55.000.000,-
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan PD			Rp. 2.487.000.000,-	APBD			Rp. 2.487.000.000,-
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Mojokerto	12 bln	Rp 2.208.000.000,-	APBD		12 bln	Rp 2.208.000.000,-
2	15	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Kabupaten Mojokerto	12 bln	Rp 99.000.000,-	APBD		12 bln	Rp 99.000.000,-
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan	Kabupaten Mojokerto	12 bln	Rp 180.000.000,-	APBD		12 bln	Rp 180.000.000,-

						kantor selama 12 bulan							
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pengembangan Perumahan			Rp. 110.250.000,-				Rp. 110.250.000,-
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan /perpanjangan perizinan kendaraan dinas operasional	Kabupaten Mojokerto	12 bln	Rp. 67.750.000,-	APBD		12 bln	Rp. 67.750.000,-
2	15	01	2.09	03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	Kabupaten Mojokerto	12 bln	Rp. 18.000.000,-	APBD		12 bln	Rp. 18.000.000,-
2	15	01	2.09	04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	Kabupaten Mojokerto	12 bln	Rp. 24.500.000,-	APBD		12 bln	24.500.000,-
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat/ aparaturnya terhadap pelayanan kesekretariatan PD	Kabupaten Mojokerto	100%	Rp. 15.000.000,-	APBD		100	Rp. 15.000.000,-

2	15	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi perundang-undangan yang terlaksana	Kabupaten Mojokerto	100%	Rp. 15.000.000,-	APBD		100	Rp. 15.000.000,-
1	04	02			Program Pengembangan Perumahan				Rp. 939.000.000,-				Rp. 939.000.000,-
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tingkat Pengembangan Perumahan			Rp. 75.000.000,-				Rp. 75.000.000,-
1	04	02	2.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus yang terdata	Kabupaten Mojokerto	1 Lap	Rp. 75.000.000,-	APBD		100	Rp. 75.000.000,-
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tingkat Pengembangan Perumahan			Rp. 464.000.000,-				Rp. 464.000.000,-
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana yang terehabilitasi	Kabupaten Mojokerto	10 Unit	Rp. 464.000.000,-	APBD		100	Rp. 464.000.000,-

1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Tingkat Pengembangan Perumahan			Rp. 350.000.000,-				Rp. 350.000.000,-
1	04	02	2.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah aplikasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	Kabupaten Mojokerto	2 aplikasi	Rp. 300.000.000,-	APBD		100	Rp. 300.000.000,-
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian, pembangunan dan pengembangan tentang Perbub PSU perumahan	Kabupaten Mojokerto	100%	Rp. 50.000.000,-	APBD		100	Rp. 50.000.000,-
1	04	02	2.07		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Tingkat Pengembangan Perumahan			Rp. 50.000.000,-				Rp. 50.000.000,-
1	04	02	2.07	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan	Persentase Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan	Kabupaten Mojokerto	20 sertifikat	Rp. 50.000.000,-	APBD		100	Rp. 50.000.000,-

					Bangunan Gedung (SKGB)	Bangunan Gedung (SKGB)							
1	04	03			Program kawasan Permukiman				Rp. 6.117.000.000,-				Rp. 6.117.000.000,-
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman Layak Huni			Rp. 175.000.000,-				Rp. 175.000.000,-
1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Tersusunnya data kawasan kumuh satu kawasan dan rencana penanganannya	Kabupaten Mojokerto	20 sertifikat	Rp. 150.000.000,-	APBD		100	Rp. 150.000.000,-
1	04	03	2.02	03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Tersusunnya data kawasan kumuh satu kawasan dan rencana penanganannya	Kabupaten Mojokerto	10 Point	Rp. 25.000.000,-	APBD		10 Point	Rp. 25.000.000,-
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman Layak Huni			Rp. 5.942.000.000,-	APBD			Rp. 5.942.000.000,-

1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumu	Tersusunnya peningkatan kualitas permukiman pada lokasi kumuh	Kabupaten Mojokerto	1 dok	Rp. 250.000.000,-	APBD		1 dok	Rp. 25.000.000,-
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	BOP BPS Jumlah DAK Bidang Perumahan dan Permukiman Jumlah Penunjang DAK Fisik bidang Perumahan dan Permukiman	Kabupaten Mojokerto	100unit 240 unit 240 unit	Rp. 5.367.000.000,-	APBN		100unit 240 unit 240 unit	Rp. 5.367.000.000,-
1	04	03	2.03	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	terbangunnya prasarana permukiman yang sehat	Kabupaten Mojokerto	1 RT	Rp. 250.000.000,-	APBD		1 RT	Rp. 250.000.000,-
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya kegiatan pemerintah pusat kota tanpa kumuh	Kabupaten Mojokerto	1 Keg	Rp. 75.000.000,-	APBD		1 Keg	Rp. 75.000.000,-
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN				Rp. 1.910.000.000,-				Rp. 1.910.000.000,-

					UTILITAS UMUM (PSU)								
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				Rp. 75.000.000,-				Rp. 75.000.000,-
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase pemeliharaan penyediaan PSU Perumahan yang tersedia untuk menunjang fungsi hunian	Kabupaten Mojokerto	100%	Rp. 1.660.000.000,-	APBD		100%	Rp. 1.660.000.000,-
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	Kabupaten Mojokerto	25 Perumahan	Rp. 250.000.000,-	APBD		25 Perumahan	Rp. 250.000.000,-
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				Rp. 5.410.000.000,-				Rp. 5.410.000.000,-
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase rencana induk jaringan LLAJ kab/kota yang tersusun			Rp. 125.000.000,-				Rp. 125.000.000,-
2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana	Jumlah kegiatan kebijakan dan sosialisasi	Kabupaten Mojokerto	100%	Rp. 50.000.000,-	APBD		100%	Rp. 50.000.000,-

					Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	rencana induk jaringan LLAJ kabupaten yang ditetapkan							
2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten yang terkendali	Kabupaten Mojokerto	15 Rakor	Rp. 70.000.000,-	APBD		15 Rakor	Rp. 70.000.000,-
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase rencana induk jaringan LLAJ kab/kota yang tersusun			Rp. 3.310.000.000,-				Rp. 3.310.000.000,-
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan rambu bersuar Jumlah prasarana jalan (Flasher/Warning Light) di jalan kab/kota yang terbangun	Kabupaten Mojokerto	100% 90%	Rp. 200.000.000,-	APBD		100% 90%	Rp. 200.000.000,-
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Rambu APILL Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang tersedia	Kabupaten Mojokerto	90% 100%	Rp. 175.000.000,-	APBD		90% 100%	Rp. 175.000.000,-

2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terehabilitasi	Kabupaten Mojokerto	100%	Rp. 200.000.000,-	APBD		100%	Rp. 200.000.000,-
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah alat penerangan jalan yang terpelihara	Kabupaten Mojokerto	100%	Rp. 2.735.000.000,-	APBD		100%	Rp. 2.735.000.000,-
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase rencana induk jaringan LLAJ kab/kota yang tersusun							
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang dipelihara	Kabupaten Mojokerto	2 Terminal	Rp. 50.000.000,-	APBD		100%	Rp. 50.000.000,-
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase rencana induk jaringan LLAJ kab/kota yang tersusun			Rp. 1.000.000.000,-				Rp. 1.000.000.000,-
2	15	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam	Jumlah fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Kabupaten Mojokerto	100%	Rp. 1.000.000.000,-	APBD		100%	Rp. 1.000.000.000,-

					Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik								
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase rencana induk jaringan LLAJ kab/kota yang tersusun			Rp. 450.000.000,-				Rp. 450.000.000,-
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia	Kabupaten Mojokerto	1 SI	Rp. 150.000.000,-	APBD		1 SI	Rp. 150.000.000,-
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana Dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor yang terpelihara	Kabupaten Mojokerto	10 Saprass	Rp. 300.000.000,-	APBD		10 Saprass	Rp. 300.000.000,-
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase rencana induk jaringan LLAJ kab/kota yang tersusun							
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam	Jumlah pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan	Kabupaten Mojokerto	1 Dok 100%	Rp. 225.000.000,-	APBD		1 Dok 100%	Rp. 225.000.000,-

					rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	jalan dalam rangka manajemen rekayasa lalu lintas Jumlah pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen rekayasa lalu lintas							
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rencana induk jaringan LLAJ kab/kota yang tersusun							
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan angkutan umum yang terkendali dan terawasi guna duta tertib lalu lintas Jumlah ketersediaan angkutan umum	Kabupaten Mojokerto	10 Org 10 Keg	Rp. 50.000.000,-	APBD		10 Org 10 Keg	Rp. 50.000.000,-

						yang terkendali dan terawasi serta pembinaan angkutan jalan							
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	JUmlah kegiatan isidentil yang terlaksana Jumlah ketersediaan angkutan umum yang terkendali dan terawasi saat lebaran, natal dan tahun baru	Kabupaten Mojokerto	100% 3 Keg	Rp. 200.000.000,-	APBD		100% 3 Keg	Rp. 200.000.000,-
					TOTAL				Rp 28.025.702.477,-				Rp 28.020.702.477,-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto pada TA. 2022 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto sebesar **Rp 28.025.702.477,-** (Dua puluh delapan milyar dua puluh lima juta tujuh ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh) adalah sebagaimana tabel berikut :

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (Usulan Prioritas dan Cadangan)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana TA. 2022				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	15	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pengelolaan administrasi perkantoran, dan Peningkatan kinerja kepegawaian	Kabupaten Mojokerto	100	Rp 13.649.702.477,-	APBD	
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan PD	Kabupaten Mojokerto		Rp 10.000.000,-	APBD	
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun	Kabupaten Mojokerto	7 Lap	Rp 5.000.000,-	APBD	
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Program dan Kegiatan PD	Kabupaten Mojokerto	7 lap	Rp 5.000.000,-	APBD	

2	15	01	2.02		Admisitrasi keuangan perangkat daerah	Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan PD	Kabupaten Mojokerto		Rp 10.278.452.477,-	APBD	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Mojokerto	14 bln	Rp 10.078.452.477,-	APBD	
2	15	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan	Kabupaten Mojokerto	12 bln	Rp 200.000.000,-	APBD	
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 749.000.000,-		
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Kabupaten Mojokerto	12 bln	Rp. 99.000.000,-	APBD	
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi	Kabupaten Mojokerto	12 bln	Rp. 540.000.000,-	APBD	
2	15	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	Kabupaten Mojokerto	12 bln	Rp. 30.000.000,-	APBD	

2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Mojokerto	12 bln	Rp. 25.000.000,-	APBD		
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas luar daerah 12 Bulan		12 bln	Rp. 55.000.000,-	APBD		
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan PD			Rp. 2.487.000.000,-	APBD		
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Mojokerto	12 bln	Rp 2.208.000.000,-	APBD		
2	15	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Kabupaten Mojokerto	12 bln	Rp 99.000.000,-	APBD		
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan	Kabupaten Mojokerto	12 bln	Rp 180.000.000,-	APBD		

2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pengembangan Perumahan			Rp. 110.250.000,-		
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan /perpanjangan perizinan kendaraan dinas operasional	Kabupaten Mojokerto	12 bln	Rp. 67.750.000,-	APBD	
2	15	01	2.09	03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	Kabupaten Mojokerto	12 bln	Rp. 18.000.000,-	APBD	
2	15	01	2.09	04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	Kabupaten Mojokerto	12 bln	Rp. 24.500.000,-	APBD	
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan PD	Kabupaten Mojokerto	100%	Rp. 15.000.000,-	APBD	
2	15	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi perundang-undangan yang terlaksana	Kabupaten Mojokerto	100%	Rp. 15.000.000,-	APBD	

1	04	02			Program Pengembangan Perumahan				Rp. 939.000.000,-		
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tingkat Pengembangan Perumahan			Rp. 75.000.000,-		
1	04	02	2.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus yang terdata	Kabupaten Mojokerto	1 Lap	Rp. 75.000.000,-	APBD	
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tingkat Pengembangan Perumahan			Rp. 464.000.000,-		
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana yang terehabilitasi	Kabupaten Mojokerto	10 Unit	Rp. 464.000.000,-	APBD	

1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Tingkat Pengembangan Perumahan			Rp. 350.000.000,-		
1	04	02	2.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah aplikasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	Kabupaten Mojokerto	2 aplikasi	Rp. 300.000.000,-	APBD	
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian, pembangunan dan pengembangan tentang Perbub PSU perumahan	Kabupaten Mojokerto	100%	Rp. 50.000.000,-	APBD	
1	04	02	2.07		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Tingkat Pengembangan Perumahan			Rp. 50.000.000,-		
1	04	02	2.07	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan	Persentase Kegiatan Penerbitan Sertifikat	Kabupaten Mojokerto	20 sertifikat	Rp. 50.000.000,-	APBD	

					Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Kepemilikan Bangunan Gedung(SKGB)					
1	04	03			Program kawasan Permukiman				Rp. 6.117.000.000,-		
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman Layak Huni			Rp. 175.000.000,-		
1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Tersusunnya data kawasan kumuh satu kawasan dan rencana penanganannya	Kabupaten Mojokerto	20 sertifikat	Rp. 150.000.000,-	APBD	
1	04	03	2.02	03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Tersusunnya data kawasan kumuh satu kawasan dan rencana penanganannya	Kabupaten Mojokerto	10 Point	Rp. 25.000.000,-	APBD	
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana			Rp. 5.942.000.000,-	APBD	

						Permukiman Layak Huni					
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumu	Tersusunnya peningkatan kualitas permukiman pada lokasi kumuh	Kabupaten Mojokerto	1 dok	Rp. 250.000.000,-	APBD	
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	BOP BPS Jumlah DAK Bidang Perumahan dan Permukiman Jumlah Penunjang DAK Fisik bidang Perumahan dan Permukiman	Kabupaten Mojokerto	100unit 240 unit 240 unit	Rp. 5.367.000.000,-	APBN	
1	04	03	2.03	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	terbangunnya prasarana permukiman yang sehat	Kabupaten Mojokerto	1 RT	Rp. 250.000.000,-	APBD	
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya kegiatan pemerintah pusat kota tanpa kumuh	Kabupaten Mojokerto	1 Keg	Rp. 75.000.000,-	APBD	
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				Rp. 1.910.000.000,-		

1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				Rp. 75.000.000,-		
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase pemeliharaan penyediaan PSU Perumahan yang tersedia untuk menunjang fungsi hunian	Kabupaten Mojokerto	100%	Rp. 1.660.000.000,-	APBD	
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	Kabupaten Mojokerto	25 Perumahan	Rp. 250.000.000,-	APBD	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				Rp. 5.410.000.000,-		
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase rencana induk jaringan LLAJ kab/kota yang tersusun			Rp. 125.000.000,-		

2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ kabupaten yang ditetapkan	Kabupaten Mojokerto	100%	Rp. 50.000.000,-	APBD	
2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten yang terkendali	Kabupaten Mojokerto	15 Rakor	Rp. 70.000.000,-	APBD	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase rencana induk jaringan LLAJ kab/kota yang tersusun			Rp. 3.310.000.000,-		
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan rambu bersuar Jumlah prasarana jalan (Flasher/Warning Light) di jalan kab/kota yang terbangun	Kabupaten Mojokerto	100% 90%	Rp. 200.000.000,-	APBD	

2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Rambu APILL Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang tersedia	Kabupaten Mojokerto	90% 100%	Rp. 175.000.000,-	APBD	
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terehabilitasi	Kabupaten Mojokerto	100%	Rp. 200.000.000,-	APBD	
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah alat penerangan jalan yang terpelihara	Kabupaten Mojokerto	100%	Rp. 2.735.000.000,-	APBD	
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase rencana induk jaringan LLAJ kab/kota yang tersusun					
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang dipelihara	Kabupaten Mojokerto	2 Terminal	Rp. 50.000.000,-	APBD	
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase rencana induk jaringan LLAJ kab/kota			Rp. 1.000.000.000,-		

						yang tersusun					
2	15	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Kabupaten Mojokerto	100%	Rp. 1.000.000.000,-	APBD	
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase rencana induk jaringan LLAJ kab/kota yang tersusun			Rp. 450.000.000,-		
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia	Kabupaten Mojokerto	1 SI	Rp. 150.000.000,-	APBD	
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana Dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor yang terpelihara	Kabupaten Mojokerto	10 Saprass	Rp. 300.000.000,-	APBD	

2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase rencana induk jaringan LLAJ kab/kota yang tersusun					
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen rekayasa lalu lintas Jumlah pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen rekayasa lalu lintas	Kabupaten Mojokerto	1 Dok 100%	Rp. 225.000.000,-	APBD	
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rencana induk jaringan LLAJ kab/kota yang tersusun					

2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan angkutan umum yang terkendali dan terawasi guna duta tertib lalu lintas Jumlah ketersediaan angkutan umum yang terkendali dan terawasi serta pembinaan angkutan jalan	Kabupaten Mojokerto	10 Org 10 Keg	Rp. 50.000.000,-	APBD	
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	JUmlah kegiatan isidentil yang terlaksana Jumlah ketersediaan angkutan umum yang terkendali dan terawasi saat lebaran, natal dan tahun baru	Kabupaten Mojokerto	100% 3 Keg	Rp. 200.000.000,-	APBD	

BAB V

PENUTUP

Pada bagian ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Memuat catatan-catatan penting, baik terkait pelaksanaan kegiatan maupun ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

a. Catatan Penting

Sesuai dengan tupoksi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto ada beberapa program yang mempunyai dana terbatas sehingga menghambat dalam mencapai target kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto. Salah satu di antaranya adalah dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 sehingga APBD pada Tahun 2020 mengalami pengurangan pagu anggaran. Hal ini berkaitan dengan mewujudkan misi ke 7 Bupati Mojokerto “Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat”.

b. Kaidah pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2023 yang akan datang.

c. Rencana tindak lanjut

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO**



EDDY TAUFIQ, S.STP

Pembina Tk I

NIP. 19790804 199810 1 001